

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi inovasi digital TULIP (Tata Usaha Link Terintegrasi Portal) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wujud nyata transformasi digital administrasi pemerintahan pada level unit pelaksana teknis yang berangkat dari kebutuhan riil organisasi. Sebelum penerapan TULIP, tata kelola administrasi di BRSBKL DIY masih didominasi oleh proses manual yang ditandai dengan ketergantungan pada arsip fisik, pencatatan laporan secara terpisah, lemahnya integrasi data antar unit, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya efektivitas pengendalian administratif. Melalui penerapan TULIP, terjadi perubahan mendasar pada pola kerja birokrasi dari sistem yang bersifat konvensional menuju sistem administrasi digital yang terintegrasi, terdokumentasi, dan berbasis data. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan dokumen, tetapi juga pada peningkatan efisiensi kerja, keteraturan arsip digital, percepatan proses pelaporan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas internal organisasi. Dengan demikian, TULIP berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat prinsip *good governance* di lingkungan BRSBKL DIY.

Berdasarkan analisis penerimaan pengguna menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), dapat disimpulkan bahwa inovasi digital TULIP diterima dengan baik oleh pegawai sebagai pengguna utama sistem. Persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) tercermin dari pengakuan pegawai bahwa TULIP mampu mempermudah pekerjaan administrasi, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan. Persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) juga dinilai positif karena sistem dirancang dengan antarmuka yang relatif

sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat dioperasikan oleh pegawai dengan tingkat literasi digital yang beragam. Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya minat perilaku untuk menggunakan (*Behavioral Intention*) serta penggunaan aktual (*actual use*) TULIP secara berkelanjutan dalam aktivitas administrasi sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di BRSBKL DIY tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna, kesiapan sumber daya manusia, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan kerja organisasi. Oleh karena itu, TULIP dapat dinilai sebagai inovasi digital yang efektif dalam mendorong modernisasi tata kelola administrasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan BRSBKL DIY di era pemerintahan digital.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, khususnya terkait penerimaan pengguna, kendala implementasi, dan proses administrasi digital melalui TULIP, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

A. Saran Kebijakan dan Praktis (untuk BRSBKL DIY dan Pemerintah Daerah)

1. Penguatan Integrasi Sistem

Berdasarkan temuan bahwa TULIP masih berdiri sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain, disarankan agar BRSBKL DIY melakukan penguatan integrasi TULIP dengan platform pemerintahan digital daerah seperti sistem kepegawaian, keuangan, dan kearsipan. Integrasi ini diperlukan untuk mengurangi duplikasi input data dan meningkatkan keterpaduan informasi administrasi.

2. Penegasan SOP Administrasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan sebagian pegawai kembali menggunakan pola kerja manual. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan dan penegasan Standar Operasional Prosedur (SOP)

administrasi berbasis digital yang seragam di seluruh unit kerja agar penggunaan TULIP berjalan konsisten dan tidak tergantung pada kebiasaan kerja individu.

3. Penanganan Hambatan SDM (Literasi Digital Pegawai)

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem TULIP. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan adanya pelatihan berkala, pendampingan teknis, serta penyediaan panduan penggunaan sistem agar seluruh pegawai memiliki kemampuan yang relatif setara dalam memanfaatkan TULIP.

4. Penguatan Budaya Kerja Digital

Berdasarkan temuan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari, diperlukan penguatan budaya kerja digital melalui kebijakan internal, monitoring penggunaan sistem, serta pemberian dorongan dari pimpinan agar TULIP digunakan secara konsisten dalam seluruh proses administrasi.

5. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur dari Pemerintah Daerah

Mengingat TULIP dikembangkan secara internal dengan sumber daya terbatas, disarankan agar Dinas Sosial DIY dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kebijakan, penganggaran, dan infrastruktur teknologi agar inovasi administrasi digital seperti TULIP dapat berkelanjutan serta terintegrasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

B. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

1. Pengembangan Metode Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur secara lebih objektif tingkat efektivitas, efisiensi, serta dampak penggunaan TULIP terhadap kinerja organisasi dan kualitas layanan publik.

2. Pengkajian Dampak Jangka Panjang

Mengingat penelitian ini masih berfokus pada penerimaan pengguna dan implementasi awal, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang TULIP terhadap tata kelola administrasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta keberlanjutan inovasi digital di lingkungan UPT.

3. Studi Perbandingan Antar Instansi

Peneliti berikutnya dapat melakukan studi komparatif antara BRSBKL DIY dengan UPT lain yang menerapkan sistem administrasi digital serupa untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi inovasi digital di berbagai konteks organisasi pemerintahan.

